

KETIKA PESANTREN BERJUMPA DENGAN INTERNET: SEBUAH REFLEKSI DALAM PERSPEKTIF *CULTURAL LAG*

Muhammad Adib

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Qolam Malang

Muhammadadib1975@gmail.com

Abstract:

Tulisan ini menfokuskan diri pada tantangan dan respon pesantren dalam era informasi. Berawal dari asumsi pesantren sebagai subkultur yang menyaring berbagai unsur luar yang tampak lebih dominan dalam rangka menjamin keutuhan Islam. Karakter seperti inilah yang menjadi alasan kenapa pesantren bisa eksis dalam kurun waktu yang sangat panjang. bisa disimpulkan bahwa pesantren saat ini sedang mengalami “kesenjangan budaya” (*cultural lag*) di saat berinteraksi dengan internet. Hal ini terbukti dari kompleksitas respon pesantren terhadap internet dan adanya arus digitalisasi pesantren yang susah dibendung.

Kata Kunci: Pesantren, *Cultural Lag*, Internet

A. Pendahuluan

Tulisan ini beranjak dari pandangan umum yang masih kuat hingga saat ini bahwa pesantren adalah sebuah subkultur (*sub-culture*) dalam pengertian sebagai gejala yang unik, otonom, dan cenderung terpisah dari dunia luar. Seperti diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (2001), labelisasi pesantren sebagai subkultur tidak lepas dari adanya tiga elemen dasar yang melekat dalam kehidupan pesantren, yaitu: (1) cara hidup yang dianut, (2) pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, dan (3) hirarki kekuasaan internal yang ditaati sepenuhnya.¹

Pandangan bahwa pesantren adalah subkultur juga diperkuat oleh Said Aqil Siraj (2006). Ketua Umum PBNU yang sering disapa akrab dengan “Kang Said” ini bahkan menyatakan bahwa selain sebagai “makelar budaya” (*cultural broker*), pesantren juga berfungsi sebagai “filter budaya” (*cultural filter*) yang menyaring berbagai unsur luar yang tampak lebih dominan dalam rangka menjamin keutuhan Islam. Karakter seperti inilah, tegas Kang Said, yang menjadi alasan kenapa pesantren bisa eksis dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun, lanjut Kang Said, karakter itu tidak lantas membuat pesantren bersifat statis. Sepanjang sejarahnya, pesantren memiliki dinamisme yang bersifat adaptatif terhadap kemajuan di luarnya, sejauh tidak berbenturan dengan pandangan hidup dan tata

¹ Abdurrahman Wahid, *Mengerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, cetakan I (Yogyakarta: LKiS, 2001), halaman 9-10.

nilai yang diyakni.² Dalam ungkapan Rayhani (2009), dalam merespon dunia luar, pesantren cenderung menempuh “caranya sendiri” (*in its own way*); ada yang cepat tetapi juga ada yang lamban. Respon cepat biasanya ditunjukkan oleh pesantren modern (*kebalaf*), sementara respon lamban biasanya ditunjukkan oleh pesantren tradisional (*salaf*).³

Predikat sebagai “subkultur”, “makelar budaya”, dan sekaligus “filter budaya” di atas menarik ketika dibawa pada konteks era informasi saat ini, di mana pesantren sudah mulai berjumpa dengan internet. Seiring dengan akselerasi teknologi yang begitu massif selama tiga dekade terakhir, masyarakat dunia saat ini telah menjelma menjadi apa yang oleh para pakar ilmu sosial disebut dengan “masyarakat informasi” (*information society*) atau “masyarakat digital” (*digital society*) yang sebenarnya merupakan pengembangan terminologis dari “masyarakat pascaindustri” (*post-industrial society*).⁴ Mengacu kepada prediksi futuristik Alvin Toffler (1980), masyarakat yang dia sebut dengan “*super post-industrial society*” ini merupakan wujud dari gelombang ketiga (*third wave*) perkembangan peradaban manusia, yakni dari masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian masyarakat pascaindustri (masyarakat informasi);⁵ sebuah prediksi yang kemudian menjadi kenyataan.

Dalam konteks perjumpaan dengan internet, pesantren menghadapi tantangan serius sekurang-kurangnya pada dua hal. Pertama, internet saat ini merepresentasikan apa yang oleh Marshal McLuhan (1962) sebagai “kampung global” (*global village*), di mana dunia dengan adanya media elektronik publik—saat itu adalah radio dan televisi—telah menyempit begitu rupa selayaknya sebuah kampung besar.⁶ Dengan adanya internet, jarak dan batas sudah tidak berfungsi lagi. Setiap orang yang mengakses internet dapat dengan seketika mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi di belahan dunia lain serta berkomunikasi dengan siapapun di mana saja dengan mudah. Pada titik ini, di saat pesantren sudah mengenal internet, maka predikat “subkultur” yang disandangnya sebenarnya menghadapi ujian serius, karena pada saat itu pesantren sebenarnya telah menjadi bagian dari “kampung global” tadi.

Kedua, massifnya arus informasi yang disajikan oleh internet, apalagi ketika didorong oleh kapitalisasi media digital, berarti bahwa—meminjam ungkapan AG. Eka Wenats Wuryanta (2004)—informasi yang diterima oleh masyarakat atau setiap orang bisa merupakan “banjir” informasi. Di satu sisi, kondisi itu menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang haus informasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Namun, di sisi yang lain, terpaan informasi tersebut bisa membuat situasi beban berlebih atas seluruh proses informasi yang diterima. Muncullah paradoks masyarakat informasi, yaitu situasi di mana informasi yang laksana “air bah” itu justru membuat mereka kesulitan mencerna

² Said Aqil Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*, cetakan I (Bandung: Mizan, 2006), halaman 207-209.

³ Rayhani, *Curriculum Construction in the Indonesian Pesantren: A Study of Curriculum Development in Two Different Pesantrens in South Kalimantan*, cetakan I (Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2009), halaman 145.

⁴ [Http://www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org), artikel “Information Society” (akses tanggal 10 Mei 2013).

⁵ Tentang tiga gelombang peradaban manusia tersebut, baca: Alvin Toffler, *The Third Wave*, cetakan I (New York: Bantam Books, 1980).

⁶ Marshal McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, cetakan I (Toronto: University of Toronto Press, 1962), halaman 21 dan 31.

informasi yang diterima sekaligus membangun tata sosial dan budaya yang lebih baik.⁷ Pada titik ini, ketika sudah mengenal internet, pesantren mau tidak mau berhadapan dengan situasi ini, sehingga predikatnya sebagai “makelar dan filter budaya” selama ini benar-benar mendapatkan ujian yang serius.

Mengamati respon pesantren menghadapi ujian di atas tentu sangat menarik. Pada konteks ini, pesantren sedang menghadapi situasi problematis antara pemenuhan kebutuhan menyerap informasi dari luar yang semakin lama semakin membesar, di satu sisi, dan komitmen untuk mempertahankan fungsi kelembagaan dan tata nilai yang dianut selama ini, di sisi yang lain. Pesantren dewasa ini, meminjam ungkapan Peter Mandaville (2009), sedang berada dalam arus “digitalisasi” Islam yang telah menjadi gejala global dunia Islam dewasa ini, di mana batas-batas pengetahuan keagamaan menjadi berubah begitu rupa.⁸ Memotret respon pesantren tersebut memang tidak begitu mudah, karena dinamika pemikiran keagamaan dan pengembangan kelembagaan di dunia pesantren sebenarnya cukup kompleks. Namun, dinamika tersebut sebenarnya bisa dipotret, meskipun mungkin tidak bisa memuaskan, dengan menggunakan perspektif “kesenjangan budaya” (*cultural lag*) yang digagas pertama kali oleh William F. Ogburn (1886-1959), yakni situasi di mana dunia budaya non-material tidak mampu mengikuti laju perkembangan dunia budaya material, di mana akibat yang muncul adalah “keketatan budaya” (*cultural shock*) dan sejumlah problem sosial, seperti menipisnya solidaritas sosial dan munculnya konflik sosial.⁹

B. Internet di Indonesia

Penggunaan internet di Indonesia memang menorehkan prestasi yang luar biasa. Menurut hasil survey Akamai Technologies edisi 2012, kecepatan koneksi internet di Indonesia menduduki peringkat teratas se wilayah Asia Pasifik dengan peningkatan kecepatan dengan stabil rata-rata 22% setiap tahun. Indonesia dalam hal ini mengalahkan negara-negara lain yang jauh lebih maju, semisal Cina, Australia, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, dan bahkan Amerika Serikat sendiri.¹⁰ Prestasi ini berbanding lurus dengan data pengguna internet di Indonesia yang terhitung sangat mencengangkan. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia per akhir tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau meningkat 8 juta dari tahun 2011 yang berjumlah 55 juta orang.¹¹ Fakta bahwa Indonesia menempati peringkat 5 dunia dalam hal penggunaan *twitter* dan peringkat 4 dalam hal penggunaan *facebook*—seperti dirilis oleh lembaga riset SemioCast pada tahun 2012—menjadi mudah dipahami.¹² Selain itu, lembaga riset MarkPlus Insight pada tahun 2012 juga menyajikan data yang menarik

⁷ AG. Eka Wenats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2004, halaman 139.

⁸ Peter Mandaville, “Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?”, *ISIM* (Leiden University), Edisi Maret 2009, halaman 23.

⁹ R.W. Smolens Jr., “Cultural Lag: Applying Time to Culture”, <http://www.dialogin.com> (akses tanggal 21 Mei 2013).

¹⁰ [Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Indonesia Miliki Koneksi Internet Tercepat di Asia Pasifik” (akses tanggal 19 Mei 2013).

¹¹ [Http://www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id), artikel “Statistik: Indonesia Internet Users” (akses tanggal 21 Mei 2013).

¹² [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “Kebanggaan Semu Indonesia Sebagai ‘Raja’ Facebook & Twitter” (akses tanggal 21 Mei 2013).

tentang perilaku pengguna internet di Indonesia, misalnya (1) 40% pengguna mengakses Internet lebih dari 3 jam setiap harinya, (2) komunitas terbesar pengguna didominasi oleh kalangan kelas menengah pada rentang usia 15-35 tahun, (3) 56,4% pengguna tahan berselancar di internet selama berjam-jam, dan (4) belanja akses per orang pengguna rata-rata mencapai Rp. 150.000,00.¹³

Terlepas dari akurasi, hasil survey di atas, di satu sisi, bisa dianggap sebagai indikasi positif bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kominfo), misalnya, bertekad untuk memajukan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong seluruh masyarakat Indonesia menjadi cerdas dan produktif supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Salah satu program yang saat ini sedang disiapkan adalah *Universal Service Obligation* (USO), yaitu penyediaan area-area WiFi atau akses internet tanpa kabel di sejumlah daerah.¹⁴ Namun, di sisi yang lain, hasil survey di atas juga menyisakan pertanyaan penting: “Apakah meningkatnya penggunaan internet di Indonesia berjalan seiring dengan laju kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya? Apakah internet di Indonesia sudah digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya?”

Meskipun tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas, dua kenyataan berikut ini sekurang-kurangnya menyajikan sebuah gambaran tentang realitas internet di Indonesia. Pertama, berdasarkan data statistik edisi 2012 yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat Indonesia menduduki peringkat 121 dunia atau berada pada kategori negara kelas menengah (*medium*). Dengan peringkat tersebut, Indonesia masih kalah dari sejumlah negara yang telah dikalahkannya dalam hal jumlah penggunaan internet, semisal Australia (peringkat 2), Amerika Serikat (3) Korea Selatan (peringkat 12), Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Cina (peringkat 101), dan Thailand (peringkat 103)—kecuali Vietnam yang berada pada peringkat 127.¹⁵ Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tadi ditunjukkan, antara lain, dengan indikator pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang masih mencapai USD 4.154 per tahun; kalah jauh dari, misalnya, Thailand (USD 7.722 per tahun), Cina (USD 7.945 per tahun), dan Malaysia (USD 13.676 per tahun).¹⁶ Data ini menjadi indikasi bahwa peningkatan luar biasa penggunaan internet di Indonesia sebenarnya tidak berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kedua, Sean Kim, Business Adviser Qeon Interactive di auditorium Universitas Bina Nusantara, pada tanggal 22 Mei 2013 yang lalu menyatakan bahwa Indonesia lebih berpotensi bagi industri game dibanding negara lainnya di Asia Tenggara. Selain karena jumlah penduduk yang sangat besar, di Indonesia saat ini terdapat sekitar 15 juta penggila game *online*, 3.000 pengembang game, dan sedikitnya 20 *publisher* game.¹⁷ Selain itu, pihak

¹³ [Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Pengguna Internet Indonesia Tertinggi Ketiga di Asia” (akses tanggal 19 Mei 2013).

¹⁴ [Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Kemkominfo Bertekad Majukan TIK” dan “Kemenkominfo Butuh Payung Hukum Penyediaan Area WiFi” (akses tanggal 21 Mei 2013).

¹⁵ [Http://www.hdr.undp.org](http://www.hdr.undp.org), artikel “Human Development Index (HDI) - 2012 Rankings” (akses tanggal 21 Mei 2013).

¹⁶ [Http://www.hdrstats.undp.org](http://www.hdrstats.undp.org), artikel “Country Profile: Human Development Indicators” (akses tanggal 21 Mei 2013).

¹⁷ [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “Indonesia Punya 15 Juta Penggila Game Online” (akses tanggal 21 Mei 2013).

Kominfo telah melansir data tingginya transaksi dan jumlah pengakses situs-situs porno di Indonesia. Tingginya belanja akses situs porno yang mencapai USD 3.673 per detik atau setara dengan Rp 33.000.000,00 lebih setiap detiknya membawa nama Indonesia bertengger di peringkat tertinggi di dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan tampil dalam 10 besar wilayah pengakses situs porno.¹⁸ Padahal tujuh provinsi tersebut termasuk kawasan pendidikan dan agama dengan jumlah lembaga pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia. Terlepas dari kaitannya dengan maraknya kekerasan dan seks bebas di Indonesia akhir-akhir ini, data ini setidaknya-tidaknyanya menjadi indikasi bahwa akselerasi perkembangan internet di Indonesia sebenarnya masih belum dipergunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan esensialnya.

C. Respon Pesantren

Sebagaimana disebutkan di atas, respon pesantren terhadap internet memang cukup kompleks. Seperti dijelaskan oleh Ahmad Budi Setiawan (2011) ketika melakukan penelitian di sejumlah pesantren di Surabaya, dalam hal pemanfaatan internet, pesantren sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah pesantren yang memanfaatkan internet sepenuhnya untuk menunjang aktivitas pesantren, baik untuk keperluan administrasi maupun untuk keperluan belajar-mengajar. Kelompok ini diwakili oleh PP Hidayatullah Surabaya dan PP Amanatul Ummah Surabaya, meskipun keduanya relatif berbeda tentang regulasi dan pemilahan akses santri terhadap internet. Kedua adalah pesantren yang memanfaatkan internet secara parsial, yakni hanya untuk keperluan administrasi saja, sementara santri secara umum tidak diperkenankan untuk mengakses internet kecuali jika mendapatkan izin dari pengasuh dan pengurus pesantren. Kelompok ini dipercontohkan dengan PP Mamba'ul Fallah Surabaya dan PP Al Khoziny Surabaya. Ketiga adalah pesantren yang sama sekali tidak memanfaatkan ataupun menyediakan fasilitas internet, baik untuk keperluan administrasi maupun kegiatan pembelajaran. Sayangnya, Ahmad Budi Setiawan tidak memberi contoh pesantren yang mewakili kelompok ketiga. Selain membuat kategorisasi, Ahmad Budi Setiawan juga menyajikan keprihatinan kalangan pengasuh pesantren terhadap pola penggunaan internet di kalangan santri untuk ragam keperluan yang tidak begitu penting, seperti game *online*, *chatting* melalui situs jejaring sosial semacam *twitter*, *facebook*, dan *friendster*, atau malah mengakses situs porno.¹⁹

Keprihatinan inilah yang sebenarnya menjadi titik tolak atau alasan utama penolakan sejumlah kalangan pesantren terhadap bentuk penggunaan tertentu dari fasilitas internet. Sikap penolakan terhadap penggunaan tertentu fasilitas internet ditunjukkan, misalnya, oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Putri (FMP3) di Lirboyo Kediri pada bulan Mei 2009 yang melontarkan fatwa haram terhadap penggunaan *facebook*, *friendster*, *twitter*, dan situs jejaring sosial lainnya jika digunakan secara berlebihan. Fatwa mereka tersebut ditekankan pada adanya hubungan pertemanan spesial lawan jenis yang berlebihan. Jika hubungan pertemanan spesial tersebut dilakukan dalam proses *kebitbbab* (menjajaki karakter pasangan untuk menikahkannya) serta mendapatkan restu dari orang tua, maka hal tersebut

¹⁸ [Http://www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), artikel "Inilah 10 Daerah Pengakses Situs Porno" (akses tanggal 19 Mei 2013).

¹⁹ Ahmad Budi Setiawan, "Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Volume 14, Nomor 2, November 2011, halaman 105-108.

tetap diperbolehkan.²⁰ Meskipun sempat diklarifikasi oleh salah seorang juru bicara PP Lirboyo Kediri bahwa yang diharamkan sebenarnya adalah “berpacaran” via jejaring sosial, bukan menggunakan jejaring sosial itu sendiri,²¹ namun fatwa tersebut tak urung memancing reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui salah seorang juru bicaranya menyatakan bahwa memfatwakan haram terhadap *facebook* dan jejaring sejenis sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena selain situs tersebut bersifat netral, kegunaannya pun seimbang atau malah lebih banyak daripada efek negatifnya. Buktinya, tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur dan Din Syamsuddin, juga memanfaatkan jejaring ini.²² Pihak Kominfo pun sempat memberi komentar bahwa jika memang jejaring sosial memang benar-benar mengancam, maka peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi sebenarnya cukup ampuh untuk mengatasi persoalan tersebut.²³

Di luar perdebatan pada rangkaian contoh kasus di atas, pesantren sebenarnya sudah menunjukkan sejumlah usaha kreatif dalam memanfaatkan jejaring sosial secara positif. Hal ini terlihat dari menjamurnya grup-grup jejaring sosial yang dibentuk oleh komunitas pesantren dan rata-rata diberi nama sesuai dengan lembaga masing-masing. Selain sebagai media perekat sosial, grup-grup juga difungsikan sebagai media diskusi dan *sharing* gagasan terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang. Pesertanya pun dari lintas “generasi”, mulai dari kalangan santri, alumni, guru, hingga pengasuh pesantren. Contoh lainnya adalah munculnya situs salampesantren.com sebagai jejaring sosial bagi komunitas pesantren dengan konsep dan fitur yang mirip dengan *facebook* dengan sejumlah modifikasi yang disesuaikan dengan alam pesantren. Situs yang dibuat oleh seorang santri dari Banten pada tahun 2012 ini terbukti mendapat sambutan hangat dari komunitas pesantren, termasuk di antaranya PP Gontor.²⁴ Dua contoh tersebut melengkapi bentuk-bentuk kreativitas lain yang telah bermunculan sebelumnya, seperti situs-situs pesantren dan jurnal-buletin buatan pesantren, sebagai gejala adanya arus baru interaksi pesantren dengan internet, yaitu digitalisasi pesantren dan munculnya pesantren digital.

D. Gejala *Cultural Lag*

Kompleksitas respon pesantren terhadap internet sebagaimana digambarkan di atas sebenarnya bisa dipahami sebagai sebuah gejala “kesenjangan budaya” (*cultural lag*). Menurut William F. Ogburn (1966) yang mencetuskan teori ini, teknologi adalah mesin utama penggerak kemajuan (*primary engine of progress*) namun senantiasa berbenturan dengan respon sosial terhadapnya. Bertumpu kepada asumsi dasar “*middle technological determinism*”, Ogburn menyatakan bahwa kesenjangan budaya terjadi pada tahapan akhir dari empat tahapan perkembangan teknologi, yaitu: (1) penemuan (*invention*), yaitu tahapan di mana teknologi pertama kali diciptakan, (2) akumulasi (*accumulation*), yaitu proses pertumbuhan dan

²⁰ [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “Fatwa Haram Internet, dari Facebook Sampai YouTube” (akses tanggal 21 Mei 2013).

²¹ [Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “Pesantren Lirboyo Klarifikasi Facebook Haram” (akses tanggal 21 Mei 2013).

²² [Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “MUI Belum Bahas Facebook Haram atau Halal” (akses tanggal 21 Mei 2013).

²³ [Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “Depkominfo: Facebook Haram Perlu Dibicarakan” (akses tanggal 21 Mei 2013).

²⁴ [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “Salampesantren.com, ‘Facebook’ ala Anak Pesantren” (akses tanggal 21 Mei 2013).

perkembangan teknologi, (3) difusi (*diffusion*), yaitu proses pertukaran dan pergulatan gagasan seputar teknologi yang pada gilirannya memunculkan temuan-temuan baru, dan (4) penyesuaian diri (*adjustment*), yaitu tahapan di mana aspek-aspek non-material dari budaya merespon temuan-temuan teknologi tersebut. Keterlambatan respon budaya non-material inilah yang menyebabkan munculnya kesenjangan budaya.²⁵

Uraian Ogburn tersebut tepat untuk menggambarkan realitas internet di pesantren dan respon sosial terhadapnya. Di saat pesantren berjumpa dengan internet, atau lebih tepatnya di saat internet mulai masuk ke dunia pesantren, maka persoalan penyesuaian diri antara pesantren dan internet menyembul ke permukaan. Di satu sisi, internet sebagai bagian dari industri kapitalisme global memiliki kepentingan untuk merambah lahan-lahan baru dan menghegemoni dunia. Indonesia, termasuk pesantren, dalam hal ini dianggap sebagai pasar yang sangat menjanjikan, mengingat masyarakatnya yang cenderung mudah “terpesona” oleh peradaban Barat dan hal-hal yang dianggap modern.²⁶ Sementara itu, di sisi yang lain, pesantren juga mau tidak mau harus ikut dalam “permainan” kapitalisme global itu, dengan kesadaran bahwa informasi dari luar mutlak diikuti dan dicerna oleh pesantren jika tidak ingin tertinggal dari akselerasi informasi yang begitu massif dewasa ini.

Dalam konteks ini, pesantren sebenarnya sedang berada pada—meminjam ungkapan Eka Wenats Wuryanta (2004)²⁷—masa transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat konsumen informasi. Komodifikasi informasi oleh kekuatan kapitalisme modern telah membentuk logika konsumerisme informasi. Logika episemik yang dimiliki oleh pesantren menjadi terbalik karena terbentuk menjadi struktur konsumen, bukan produsen, informasi. Pesantren kemudian cenderung menjadi “penonton” pasif yang selalu siap menerima arus informasi yang melanda seperti air bah. Dalam menggunakan internet dan menyerap informasi pun, pesantren tidak lagi menyerap informasi dalam bentuk nilai guna atau utilitasnya, tetapi lebih banyak berkaitan dengan logika sosial dan gaya hidup baru yang semakin terasing dari kebutuhan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Fakta bahwa komunitas pesantren menjadi bagian dari jumlah fantastis pengguna internet di Indonesia mengindikasikan semua itu. Kasus-kasus penggunaan internet yang menyimpang di sejumlah kalangan dunia pesantren, termasuk di dalamnya ragam reaksi internal pesantren terhadapnya, juga menjadi semacam “sisi lain” dari realitas internet di pesantren.

Namun, dunia pesantren sebenarnya tidak dalam kondisi “diam” menghadapi situasi transisional di atas. Ragam usaha kreatif yang dilakukan oleh sejumlah kalangan pesantren sebagaimana telah diceritakan di atas menjadi gambaran yang jelas bahwa pesantren sedang melakukan apa yang oleh Ogburn (1966) disebut sebagai upaya “penyesuaian diri” (*adjustment*) seperti telah disebutkan di atas. Upaya yang dilakukan oleh komunitas pesantren tadi merupakan langkah awal yang baik untuk mempersempit kesenjangan antara temuan baru kebudayaan (*new material invention*) dan ragam aspek kebudayaan non-material (*non-material culture*); dengan kata lain, untuk mengakhiri masa “kesenjangan budaya” (*cultural lag*). Namun, proses penyesuaian tersebut tentu masih memerlukan jangka waktu yang lama serta usaha keras yang tidak akan mudah. Selain karena mereka masih berhadapan dengan

²⁵ Jesus Romero Monivas, “Cultural Lag”, George Ritzer dan J. Michael Ryan (ed.), *The Concise Encyclopedia of Sociology* (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2011), halaman 109.

²⁶ Hal ini dinyatakan sendiri secara terbuka oleh Nophin sebagai penggiat gadget dari Jeruknipis.com dalam acara Ngopi Bareng detikINET yang bertajuk “Rahasia di Balik Ketenaran BlackBerry di Indonesia”. Lihat: [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “BlackBerry Laku Karena Orang Indonesia Latah” (akses tanggal 21 Mei 2013).

²⁷ Eka Wenats Wuryanta, “Digitalisasi.”, halaman 139-140.

kompleksitas respon pesantren terhadap internet dan persoalan sumber daya, proses penyesuaian diri dalam konteks kesenjangan budaya, sebagaimana ditegaskan oleh Ogburn sendiri, biasanya memang memakan waktu yang lama, bahkan bisa puluhan tahun.²⁸

E. Penutup

Dari seluruh uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pesantren saat ini sedang mengalami “kesenjangan budaya” (*cultural*) di saat berinteraksi dengan internet. Hal ini terbukti dari kompleksitas respon pesantren terhadap internet dan adanya arus digitalisasi pesantren yang susah dibendung. Dunia pesantren pun berusaha untuk beradaptasi seraya mengkonstruksi bentuk-bentuk penggunaan internet yang sesuai dengan tata nilai yang mereka anut, di satu sisi, dan kebutuhan terhadap informasi, di sisi yang lain. Proses adaptasi tersebut, pada gilirannya, membawa pengaruh perubahan yang cukup besar terhadap cara berpikir, pola perilaku, dan gaya hidup pesantren itu sendiri yang acapkali tertatih-tatih di dalam mengejar akselerasi perkembangan internet yang mereka gunakan.

Dunia pesantren memang dituntut untuk benar-benar siap menjadi bagian dari masyarakat informasi, jika memang tidak ingin tertinggal jauh atau kehilangan jati diri. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh pesantren adalah menentukan konsep teknologi dan masyarakat informasi seperti apa yang hendak dibangun. Pesantren harus segera merumuskan visi, misi, dan strategi yang jelas terkait dengan aksestabilitasnya terhadap internet, sehingga akselerasi internet yang semakin pesat dewasa ini bisa menjadi kekuatan (*strengths*) sekaligus peluang (*opportunities*), bukan malah ancaman (*threats*) ataupun kelemahan (*weaknesses*), bagi pengembangan kualitas SDM pesantren sendiri dalam arti yang sebenarnya. Akan lebih strategis lagi, jika pesantren mampu mempertautkan secara sinergis antara tata nilai yang dianutnya dan akselerasi internet yang diikutinya. Apabila hal ini berhasil, maka pesantren bukan hanya bisa melewati fase genting “kesenjangan budaya” yang dialaminya saat ini semata, tetapi juga bisa menjadi model bagaimana sebuah produk kapitalisme global bisa diserap dan dikelola secara konstruktif dan produktif. Agenda ini jelas belum dikatakan terlambat untuk dilakukan sekarang ini. Mengapa, sebab pesantren harus melihat perkembangan teknologi dan informasi secara paralel dengan proses industri dan logika internal yang menyertainya, sekaligus harus tetap menyikapinya secara kritis. Artinya, digitalisasi pesantren jangan sampai semakin mengalienasi dan mereduksi fungsi pesantren berikut tata nilai yang dianutnya selama ini.

Last but not least, tulisan ini tentu sangat jauh dari kata memuaskan. Ragam kelemahan, kekurangan, dan bahkan kesalahan tentu mustahil untuk dihindari dari tulisan ini. Itulah sebabnya, kritik konstruktif dari dosen pengampu dan teman-teman sekelas bisa menjadi pendorong penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wa Allāh a'lam bi al-shawāb.

Yogyakarta, 16 Juli 2013

²⁸ [Http://www.sociologyguide.com](http://www.sociologyguide.com), artikel “Basic Concepts of Cultural Lag” (akses tanggal 20 Mei 2013).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Wahid, 2011. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- AG. Eka Wenats Wuryanta. 2004. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 1, Nomor 2, Desember 2004.
- Ahmad Budi Setiawan. 2011. "Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat". *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Volume 14, Nomor 2, November 2011.
- Mandaville, Peter. 2009. "Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?". *ISIM* (Leiden University). Edisi Maret 2009.
- McLuhan, Marshal. 1962. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Cetakan I. Toronto: University of Toronto Press.
- Monivas, Jesus Romero. 2011. "Cultural Lag". George Ritzer dan J. Michael Ryan (ed.), *The Concise Encyclopedia of Sociology*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Rayhani. 2009. *Curriculum Construction in the Indonesian Pesantren: A Study of Curriculum Development in Two Different Pesantrens in South Kalimantan*. Cetakan I. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
- Said Aqil Siraj. 2006. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Cetakan I. Bandung: Mizan.
- Smolens Jr., R.W. "Cultural Lag: Applying Time to Culture". [Http://www.dialogin.com](http://www.dialogin.com) (akses tanggal 21 Mei 2013).
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. Cetakan I. New York: Bantam Books.
- [Http://www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id), artikel "Statistik: Indonesia Internet Users" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org), artikel "Information Society" (akses tanggal 10 Mei 2013).
- [Http://www.hdr.undp.org](http://www.hdr.undp.org), artikel "Human Development Index (HDI) - 2012 Rankings" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.hdrstats.undp.org](http://www.hdrstats.undp.org), artikel "Country Profile: Human Development Indicators" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel "BlackBerry Laku Karena Orang Indonesia Latah" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel "Fatwa Haram Internet, dari Facebook Sampai YouTube" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel "Indonesia Punya 15 Juta Penggila Game Online" (akses tanggal 21 Mei 2013).
- [Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel "Kebanggaan Semu Indonesia Sebagai 'Raja' Facebook & Twitter" (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com), artikel “Salampesantren.com, ‘Facebook’ ala Anak Pesantren” (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), artikel “Inilah 10 Daerah Pengakses Situs Porno” (akses tanggal 19 Mei 2013).

[Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Indonesia Miliki Koneksi Internet Tercepat di Asia Pasifik” (akses tanggal 19 Mei 2013).

[Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Kemkominfo Bertekad Majukan TIK” dan “Kemenkominfo Butuh Payung Hukum Penyediaan Area WiFi” (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), artikel “Pengguna Internet Indonesia Tertinggi Ketiga di Asia” (akses tanggal 19 Mei 2013).

[Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “Depkominfo: Facebook Haram Perlu Dibicarakan” (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “MUI Belum Bahas Facebook Haram atau Halal” (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id), artikel “Pesantren Lirboyo Klarifikasi Facebook Haram” (akses tanggal 21 Mei 2013).

[Http://www.sociologyguide.com](http://www.sociologyguide.com), artikel “Basic Concepts of Cultural Lag” (akses tanggal 20 Mei 2013).